

PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN

Wahyu Nur Aidil Fitra¹, Syahriyah Semaun², Sri Wahyuni Nur³
Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare
wahyunuraidilfitra@iainpare.ac.id¹, syahriyahsemaun@iainpare.ac.id²,
sriwahyuninur@iainpare.ac.id³

ABSTRACT

Government Accounting Standards (SAP) are accounting principles applied in preparing and presenting government financial reports. It is believed that the implementation of SAP will have an impact on improving the quality of financial reporting in central and regional governments. The aim of this research is to find out how big and influential the implementation of government accounting standards is on the quality of financial reports at the Regional Financial Agency of Parepare City. This research method uses a quantitative approach and also uses an associative research approach which aims to analyze the relationship between two or more variables. This type of research is field research. The results of this study show asymp. Sig is greater than probability 0.05 (0.200 > 0.05) this data is normally distributed. The results of the One Sample T test show that the value of Government Accounting Standards (variable test results show that the value obtained has a positive and significant effect, meaning that H_0 is accepted. The coefficient of determination (adjusted R square) value is 0.788, or 78.8%. From these figures the relationship between the independent variable and the dependent variable is strongly correlated. This finding highlights the importance of SAP application to foster transparency and accountability of government financial report.

Keywords: Government Accounting Standards, Quality of Financial Reporting.

ABSTRAK

Standar akuntansi pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar dan berpengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif di samping itu juga menggunakan pendekatan penelitian korelasi yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel atau lebih. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Hasil penelitian ini menunjukkan asymp. Sig lebih besar dari probabilitas 0,05 (0,200 > 0.05) data ini berdistribusi normal. Hasil pengujian One Sample T test menunjukkan nilai Standar Akuntansi Pemerintahan (variabel X) sebesar $0,353 < t$ tabel sebesar 2,045 dan Kualitas Laporan Keuangan Daerah (variabel Y) t hitung sebesar $0,985 < t$ tabel sebesar 2,045. Hasil pengujian tersebut nilai yang didapatkan berpengaruh secara positif dan signifikan maka diartikan bahwa H_0 diterima. nilai koefisiensi determinasi (adjusted R square) sebesar 0,788, atau 78,8%. Dari angka tersebut hubungan antara variabel independen dan variabel dependen berkorelasi kuat. Temuan ini menegaskan

pentingnya penerapan SAP untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan pemerintah

Kata Kunci: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Laporan Keuangan

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah dituntut untuk tertib, transparan, dan akuntabel guna mewujudkan pemerintahan yang bersih. Salah satu upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih maka pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan tersebut setidaknya berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan yang berkualitas dapat memberikan manfaat dalam upaya mengambil kebijakan suatu pemerintahan di masa yang akan datang.

Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih. Salah satu upaya untuk mencapai ini adalah penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang membantu dalam penyusunan laporan keuangan daerah yang akurat dan dapat dipercaya. Laporan keuangan pemerintah daerah harus mencakup laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan keuangan untuk memastikan akuntabilitas anggaran. BKD Parepare menghadapi tantangan dalam memastikan setiap unit kerja mematuhi SAP, mengingat pentingnya kualitas laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan kebijakan.

Sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) berdasarkan (peraturan Menteri Dalam Negeri, No. 21 Tahun 2011) merupakan serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan, dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sering dengan tuntutan keterbukaan dan pertanggung jawaban dalam pelaksanaan otonomi daerah pada pengelolaan keuangan daerah, instansi pemerintah diwajibkan melakukan pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan keuangan yang didasarkan pada perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Dalam rangka pertanggungjawaban tersebut diperlukan penerapan sistem pelaporan yang tepat, jelas, dan terukur sesuai dengan prinsip transparansi dan

akuntabilitas. Oleh karena itu, diperlukan adanya perubahan dan pengembangan¹. Pelaporan keuangan membantu memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan (stakeholder), tentang kondisi keuangan pemerintah.

Bentuk pertanggung jawaban pemerintah daerah adalah dengan menerbitkan laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan pemerintah daerah setiap tahunnya akan diperiksa dan mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Sesuai dengan pasal 31 ayat (1) UU nomor 17 Tahun 2003 menyatakan Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah (perda) tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selambat – lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Kualitas laporan daerah harus berkualitas sesuai dengan yang di ungkapkan dalam standar akuntansi pemerintahan (SAP)

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Semakin baik pemahaman serta penerapan standar akuntansi pemerintahan pusat dan daerah, maka akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan daerah dapat dikatakan berkualitas jika telah memenuhi beberapa karakteristik antara lain yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Jika karakteristik tersebut telah memenuhi maka dapat dikatakan bahwa laporan keuangan pemerintahan daerah tersebut sudah benar – benar berkualitas laporannya. Hal ini telah dipenuhi oleh Pemerintah Kota Parepare. Dilansir dari pareparekota.go.id (2022), pemerintah Kota Parepare kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

BKD (Badan Keuangan Daerah) Kota Parepare merupakan unsur penunjang keuangan yang menjadi kewenangan daerah, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris daerah. BKD juga mempunyai tugas menyusun dan perencanaan kerja dan pengelolaan keuangan. Namun kinerja SKPD pengelola pendapatan daerah masih perlu dioptimalkan, mengingat masih

¹ Asmayanti. Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD)

adanya beberapa SKPD pengelola sumber pendapatan yang tidak mencapai realisasi target pendapatan sampai akhir tahun dan paradigma baru pengelolaan keuangan daerah, masih ada peraturan pengelolaan keuangan yang terkadang tidak simetris dengan peraturan lainnya, di samping itu reformasi peraturan perundang – undangan dibidang keuangan yang berjalan dengan cepat, sehingga masih ada perangkat daerah yang belum memahami sepenuhnya mekanisme serta data-data yang mendukung dalam penyusunan laporan keuangan.

Hal ini menggambarkan adanya kesalahan atau kurangnya standar akuntansi pemerintahan yang seharusnya menjadi acuan atau dasar dalam penyusunan laporan keuangan. SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Maka dari itu, pemahaman aparatur atau pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan atas penerapan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 mengenai standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang kemudian diubah menjadi nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, kemudian diubah lagi menjadi Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 22/PMK.05/2022 memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintahan.

Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penerapan yang dikemukakan oleh Nugroho Tahun 2014 menyatakan bahwa Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Penerapan pada prinsipnya adalah cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Penerapan dapat dilaksanakan apabila keputusan yang ditetapkan sebelumnya sesuai dan selaras sehingga tujuan yang diinginkan organisasi dapat terlaksana².

Penelitian yang dilakukan oleh Alisha Tahun 2020 menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sumber daya berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah pemerintah kota Kediri³. Penelitian yang dilakukan oleh Ini Komang Ayu Maharini, dkk. Tahun 2021 menunjukkan bahwa penerapan standar

² Riant Nugroho. *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014).

³ Alisha Ristanti Hermawan. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kediri. *Humantech : Jurnal Ilmiah Multi Disiplin*. (2022).

akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan⁴. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah Kota Parepare. Adapun hipotesis penelitian ini adalah penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada kantor keuangan daerah kota Parepare. Penelitian ini berkontribusi pada wawasan terkait kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah. Penelitian ini juga berkontribusi terhadap literatur tambahan yang dapat dijadikan rujukan dalam menganalisis penerapan SAP pada pemerintahan daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan penelitian korelasi. Lokasi penelitian ini adalah di kantor Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Parepare bagian Akuntansi yang terletak di jalan Jendral Sudirman No. 78, Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu pimpinan dan staf pada Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Parepare yang terdiri dari 30 orang. Penelitian ini tidak menggunakan *sampling*, yakni semua populasi diberikan kuesioner. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik kuantitatif yang digunakan untuk menguji pengaruh variabel terikat. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Deskripsi Hasil Penelitian

Responden yang berusia < 25 tahun sebanyak 2 orang atau 6.7%, sedangkan responden yang berusia 26 – 30 tahun berjumlah 6 orang atau sebanyak 20.0%, usia 31 – 35 tahun sebanyak 2 orang atau 6.7%, kemudian yang berusia 36 – 40 tahun berjumlah 6 orang atau 20.0%, dan yang berusia > 41 tahun berjumlah 14 orang atau 46.7%. dengan demikian dapat di simpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berusia > 40 tahun yang merupakan kepala bagian dan staf pada badan keuangan daerah Kota Parepare. Responden yang menempuh Pendidikan D3 sebanyak 3 orang atau 10.0%,

⁴ Ni Komang Ayu Mahartini. et.al. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern, Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Karangasem. *Jurnal Karma*. (2021)

yang menempuh Pendidikan S1 sebanyak 17 orang atau 56.7%, dan yang menempuh Pendidikan S2 sebanyak 10 orang atau 33.3% sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas Pendidikan terakhir seluruh responden di Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Parepare adalah S1. Responden yang bekerja selama 1 – 3 tahun sebanyak 7 orang atau 23.3%, responden yang bekerja selama 4 – 5 tahun sebanyak 4 orang atau 13.3%, dan responden yang bekerja selama > 5 tahun sebanyak 19 orang atau 63.3%. sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden bekerja di atas 5 tahun.

2. Uji t

Tabel 1. Hasil Pengujian Uji t

Unstandardized Coefficients			t	Sig.
Model	B	Std. Error		
1	(Constant)	17.293	4.208	.000
	SAP	.621	.092	.000

Sumber : Hasil olah data SPSS

Standar akuntansi pemerintahan (X) menunjukkan *coefficients beta* bertanda positif sebesar 0,621 pada tingkat signifikansi 0,000 karena tingkat signifikansi 0,000 < 0,05, maka hasil ini menunjukkan bahwa variabel standar akuntansi pemerintah (X) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan (Y) pada kantor keuangan daerah kota parepare.

3. Uji Regresi Linier Sederhana

Berdasarkan tabel yang ada di bawah ini diketahui nilai *constant* (a) sebesar 17,293 sedangkan nilai SAP (b/koefisien regresi) sebesar 0,621 sehingga persamaan regresi:

$$Y = a + \beta x$$

$$Y = 17,293 + 0,621X$$

Tabel 2. Hasil Pengujian Uji Regresi Linier Sederhana

Unstandardized Coefficients		
Model	B	Std. Error
1	(Constant)	17.293
	SAP	.621

Sumber : Hasil olah data SPSS

4. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil uji regresi menunjukkan bahwa penerapan SAP memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, dengan koefisien beta sebesar 0,621 dan signifikansi 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan SAP, semakin tinggi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Koefisien determinasi (R^2) sebesar 78,8% menunjukkan bahwa penerapan SAP menjelaskan sebagian besar variabilitas dalam kualitas laporan keuangan di BKD Parepare.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan demikian, laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Namun demikian, berhubung laporan keuangan pemerintah berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, maka komponen laporan keuangan yang disajikan setidaknya–tidaknya mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebutuhan informasi tentang kegiatan operasional pemerintah serta posisi kekayaan dan kewajiban dapat memenuhi dengan lebih baik dan memadai apabila didasarkan pada basis akrual, yakni berdasarkan pengakuan munculnya hak dan kewajiban bukan berdasarkan arus kas semata⁵.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Mujihal Fikri Jalil, menyatakan bahwa penyusunan laporan keuangan yang dimaksud yakni mencakup indikator seperti pengidentifikasian jenis transaksi dan pengklasifikasian transaksi berdasarkan akun ataupun komponennya. Selain itu, menjaga reliabilitas atau keadaan dokumen atau bukti transaksi juga harus senantiasa dilakukan. Adanya nota palsu, struk palsu, dan sejenisnya yang dijadikan sebagai bukti transaksi menjadi alasan mengapa langkah tersebut menjadi sangat *urgent*⁶. Hasil penelitian yang dilakukan oleh akuntabilitas adalah suatu bentuk pertanggung jawaban oleh pihak yang diberi kepercayaan oleh masyarakat/individu dimana nantinya terdapat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugasnya tersebut dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

⁵ Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. *Standar Akuntansi Pemerintahan*. (2021), hal. 9.

⁶ Muhammad Mujihal Fikri Jalil. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Informasi Keuangan Daerah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Transparansi Sebagai Pemoderasi. *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*. h. 66 – 67. (2021).

Pertanggung jawaban tersebut berkaitan langsung dengan aktivitas birokrasi yang memberikan pelayanan sebagai kontra prestasi atas hak-hak yang telah dipungut langsung maupun tidak langsung dari masyarakat⁷.

Guna menganalisis hal tersebut, standar akuntansi pemerintahan harus bisa diterapkan secara relevan, andal, dapat dibandingkan, dan memiliki tingkat kesepahaman yang baik dari seluruh *stakeholder*. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh bapak Agus selaku Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Parepare yang dimana beliau mengemukakan bahwa “kesesuaian jurnal seimbang belum tentu benar maka dari itu kita minta penjelasannya mengenai jurnal tersebut kesalahan yang sering terjadi terdapat pada aset dan penyusutan maka solusinya dari hal tersebut adalah dilakukannya rekonsiliasi pada bagian aset dan SKPD, tidak bisa dikatakan WTP (wajar tanpa persyaratan) kalau terjadi selisih dan jika tidak bisa dijelaskan mengapa terjadi selisih maka instansi tersebut akan di pending penerimaan pencairan dana sementara (pembekuan proses permintaan dana)”⁸.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa kehati-hatian terhadap suatu jenis akun sangat mempengaruhi suatu laporan keuangan jika hal ini tidak diperhatikan maka SAP sebagai acuan utama dalam akuntansi pemerintahan tidak memiliki pengaruh yang baik dalam mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas. Badan Keuangan Daerah Kota Parepare sudah menunjukkan pentingnya standar akuntansi pemerintahan demi mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori penerapan yang dikemukakan oleh Nugroho Tahun 2014 dimana Teori penerapan berfokus pada bagaimana kebijakan, aturan, atau standar diimplementasikan dalam praktik. Dalam konteks laporan keuangan, penerapan SAP yang benar dan konsisten adalah krusial untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan andal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan maka dapat disimpulkan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dimana dalam menunjang kualitas laporan

⁷ Sri Wahyuni Nur. Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tellumpanue Kabupaten Maros. *PROSIDING UM JEMBER PRESS*. h. 730 – 731. (2021).

⁸ Agussalim. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Parepare. *Wawancara* di lakukan di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare. 4 Oktober 2023. 11:00.

keuangan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare sebagai dasar dan tolak ukur penyusunan laporan keuangan dan mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang disebabkan oleh pihak-pihak tertentu. Jika instansi pemerintah mematuhi SAP dengan baik, laporan keuangan yang dihasilkan akan sesuai dengan standar yang ditetapkan, sehingga meningkatkan kualitas laporan tersebut. Kualitas laporan keuangan yang baik, hasil dari penerapan SAP yang benar, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik oleh manajemen dan pihak terkait lainnya. Dengan demikian, teori penerapan menggambarkan pentingnya konsistensi dan kesesuaian dalam penerapan standar akuntansi untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan dalam laporan keuangan dapat digunakan secara efektif dalam pengambilan keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmayanti, W. Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Buru. *Universitas Muhammadiyah Makassar*, 2022.
- Hermawan, Alisha Ristanti. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kediri. *Humantech : Jurnal Ilmiah Multi Disiplin*, 2022.
- Jalil, Muhammad Mujihal Fikri. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Informasi Keuangan Daerah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Transparansi Sebagai Pemoderasi. UIN Alauddin Makassar, 2021.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. *Standar Akuntansi Pemerintahan*. 2021.
- Mahartini, Ni Komang Ayu. et.all. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern, Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Karangasem. *Jurnal Karma (karya riset mahasiswa akuntansi)*, 2021.
- Nur, Sri Wahyuni. Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tellumpanue Kabupaten Maros. *UM JEMBER PRESS*, 2021.
- Riant Nugroho. Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.